

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang dapat memengaruhi maupun dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Freeman *et al.* (2010) mendefinisikan *stakeholder* sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman melalui bukunya yang berjudul *Strategic Management: A Stakeholder Approach* pada tahun 1984. Teori ini berkembang sebagai pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan menciptakan nilai serta menjaga hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Menurut Freeman *et al.* (2010), teori *stakeholder* berfokus pada hubungan antara perusahaan dan kelompok maupun individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas entitas, sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap para *stakeholder* tersebut. Teori *stakeholder* menjabarkan perusahaan harus mampu menciptakan nilai bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan operasional. Nilai tersebut tidak hanya ditujukan kepada investor atau pemegang saham, tetapi juga kepada pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat, dan pihak lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Freeman *et al.* (2010)

menjabarkan bahwa kepentingan para *stakeholder* bersifat saling terkait sehingga penciptaan nilai perusahaan perlu dilakukan dengan memperhatikan setiap *stakeholder* secara bersamaan.

Perspektif teori *stakeholder* menjabarkan penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel menjadi wujud nyata dari entitas terhadap pihak berkepentingan (Dewi *et al.* 2025). Penyajian laporan keberlanjutan menjadi instrumen utama dalam mendokumentasikan performa perusahaan pada dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis, sekaligus berfungsi sebagai saluran pertanggungjawaban informasi kepada publik (Mutiha, 2023). Laporan keberlanjutan dipandang sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholder* untuk menunjukkan bagaimana mengelola dampak aktivitas operasionalnya secara berkelanjutan (Suhardjo *et al.* 2025)

Kemampuan finansial yang mumpuni pada perusahaan yang profitabel memungkinkan mereka untuk lebih responsif terhadap tekanan *stakeholder*. Oleh sebab itu, teori *stakeholder* sangat tepat digunakan sebagai dasar logika untuk menjelaskan mengapa tingkat profitabilitas memengaruhi luasnya penyajian laporan keberlanjutan (Suroso, 2025). Demi mempertahankan hubungan yang positif dengan seluruh pemangku kepentingan, perusahaan perlu mengomunikasikan informasi yang transparan dan substansial, yang meliputi laporan kondisi keuangan serta aktivitas sosial dan lingkungan.

Ketika entitas mempunyai profitabilitas tinggi, entitas cenderung merasa kepercayaan *stakeholder* telah diperoleh melalui pencapaian laba yang baik sehingga kebutuhan untuk memperluas pengungkapan laporan keberlanjutan

menjadi lebih rendah (Dewi *et al.* 2025). Meskipun demikian, menurut Wijaya dan Kusumawati (2025), keterbatasan kemampuan finansial tidak menghalangi perusahaan untuk menyajikan laporan keberlanjutan demi menjaga *kepercayaan stakeholder*.

Leverage mencerminkan besarnya peran kreditur sebagai *stakeholder* eksternal perusahaan (Febriyanti, 2021). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas bagi entitas dengan *leverage* tinggi sebagai strategi untuk merespons tekanan serta menjaga hubungan baik dengan para kreditur (Anggara *et al.* 2023). Dalam kerangka teori *stakeholder*, *leverage* mendorong entitas guna menyampaikan laporan keberlanjutan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan risiko dan keberlanjutan usaha (Dewi *et al.* 2025).

Teori *stakeholder* juga menjelaskan peran *good corporate governance* dalam mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan. Dewan komisaris yang lebih besar dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta memotivasi manajemen guna mengungkapkan informasi keberlanjutan secara lebih transparan (Pratitarari dan Honggowati, 2025). Dewan komisaris independen dalam perspektif teori *stakeholder* berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan *stakeholder* di luar manajemen dan pemegang saham pengendali, sehingga keberadaannya bertujuan untuk menjaga objektivitas pengambilan keputusan perusahaan (Irawan dan Kusumawati, 2025). Dewan komisaris independen diharapkan mampu mengurangi benturan kepentingan antara manajemen serta *stakeholder* untuk mendorong transparansi informasi, termasuk dalam pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada *stakeholder*

(Pratitarari dan Honggowati, 2025). Penelitian terdahulu merepresentasikan bahwa efektivitas peran dewan komisaris independen dalam mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan masih menunjukkan hasil yang beragam, yang mengindikasikan bahwa peran tersebut tidak selalu berjalan secara optimal dalam praktik (Dewi *et al.* 2025).

Sementara itu, komite audit menjalankan fungsi supervisi untuk memvalidasi keakuratan dan reliabilitas laporan yang dipublikasi perusahaan kepada para *stakeholder* (Irawan dan Kusumawati, 2025). Dalam perspektif teori *stakeholder*, komite audit berperan menjamin bahwa laporan keberlanjutan disusun secara kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan (Dewi *et al.* 2025). Studi terdahulu dilakukan oleh Ulfa *et al.* (2025) membuktikan bahwa komite audit mempunyai keterkaitan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan, meskipun dalam beberapa kondisi perannya masih bersifat formal dan belum optimal.

Berdasarkan teori *stakeholder*, dapat disimpulkan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan hasil dari cara entitas untuk menyelaraskan kepentingan *stakeholder* yang diwujudkan dengan memanfaatkan kekuatan kondisi keuangan yang didukung oleh implementasi fungsi pengawasan tata kelola yang optimal (Anggara *et al.* 2023). Maka dari itu, teori *stakeholder* dinilai relevan dan mampu menjelaskan hubungan antara profitabilitas, *leverage*, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, khususnya terhadap perusahaan sektor energi dan bahan baku yang mempunyai pengaruh sosial dan lingkungan yang signifikan (Suhardjo *et al.* 2025).

2.1.2 Laporan Keberlanjutan

2.1.2.1 Definisi Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan berfungsi sebagai media transparansi yang memaparkan dampak aktivitas bisnis pada aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan demi memenuhi ekspektasi akuntabilitas *stakeholder* (Mutih, 2023). Menurut Febriyanti (2021), laporan keberlanjutan mengintegrasikan data nonfinansial yang relevan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan gambaran yang lebih utuh dibandingkan dengan apa yang tersaji dalam laporan keuangan standar. Laporan keberlanjutan juga dipandang sebagai media komunikasi perusahaan kepada investor, kreditur, dan masyarakat dalam menyampaikan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan usaha jangka panjang (Anggara *et al.* 2023). Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan dapat menunjukkan bagaimana aktivitas bisnis dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi sekaligus dampak sosial dan lingkungan yang dicetuskan (Dewi *et al.* 2025). Penelitian lain menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan menjadi sarana bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas aktivitas operasional yang berpotensi menimbulkan risiko sosial dan lingkungan (Ebenhaezer dan Rahayu, 2022)

Tata kelola perusahaan dalam laporan keberlanjutan dipandang sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kepada *stakeholder* atas keputusan dan kebijakan yang diambil (Madona dan Khafid, 2020). Penelitian Sriningsih dan Wahyuningrum (2022) menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan digunakan untuk merespons tekanan *stakeholder* serta membangun legitimasi sosial,

khususnya pada perusahaan yang beraktivitas dalam sektor yang memiliki dampak lingkungan tinggi.

2.1.2.2 Aspek Laporan Keberlanjutan

Laporan keberlanjutan disusun berdasarkan tiga aspek utama yang mencerminkan dampak aktivitas entitas secara menyeluruh, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Global Reporting Initiative, 2021). Ketiga dimensi tersebut merepresentasikan pilar *triple bottom line* yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan menggambarkan bahwa dampak operasional korporasi secara menyeluruh (Freeman *et al.* 2010). Konsep ini menegaskan bahwa indikator keberhasilan dan eksistensi jangka panjang perusahaan tidak lagi diukur secara tunggal melalui kinerja finansial, melainkan juga dari kontribusi nyata terhadap masyarakat dan pelestarian alam (Mutih, 2023).

Aspek ekonomi dalam laporan keberlanjutan berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan kontribusi finansial dan mendistribusikan kemakmuran tersebut kepada elemen *stakeholder*, seperti investor, karyawan, pemerintah, serta komunitas lokal (Mutih, 2023). Pengungkapan aspek ekonomi mencerminkan keberlanjutan kinerja usaha dan menjadi landasan bagi investor dalam mengestimasi prospek keberlanjutan (Ebenhaezer dan Rahayu, 2022)

Aspek sosial mencerminkan tanggung jawab terhadap kesejahteraan tenaga kerja, masyarakat, serta hubungan perusahaan dengan komunitas di sekitar wilayah operasional (Global Reporting Initiative, 2021). Pengungkapan aspek sosial menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola keselamatan dan kesehatan kerja,

hubungan industrial, serta kontribusi sosial elemen dari tanggung jawab sosial entitas (Madona dan Khafid, 2020)

Aspek lingkungan berkaitan dengan dampak aktivitas operasional perusahaan terhadap lingkungan hidup, termasuk penggunaan sumber daya alam, konsumsi energi, emisi, serta pengelolaan limbah (Global Reporting Initiative, 2021). Aspek ini menjadi sangat relevan bagi perusahaan sektor energi karena aktivitas operasionalnya memiliki potensi dampak lingkungan yang tinggi, sehingga pengungkapan aspek lingkungan diperlukan untuk merespons tekanan regulator dan Masyarakat (Sriningsih dan Wahyuningrum, 2022)

Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dan digunakan secara bersama-sama untuk menilai kualitas dan keluasan pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan (Dewi *et al.* 2025). Keselarasan dalam menyajikan informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang disesuaikan dengan karakteristik serta risiko usaha, merupakan indikator utama dari sebuah laporan keberlanjutan yang berkualitas (Irawan dan Kusumawati, 2025).

2.1.2.3 Prinsip Laporan Keberlanjutan

Penyusunan laporan keberlanjutan mengacu pada penetapan prinsip-prinsip standar *Global Reporting Initiative* (GRI) untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan relevan, andal, dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (Global Reporting Initiative, 2021). Penetapan prinsip laporan keberlanjutan dapat memberikan informasi yang berkualitas dalam penilaian laporan keberlanjutan oleh stakeholder (Mulyani, 2022). Dengan adanya prinsip dasar dalam menentukan isi laporan keberlanjutan serta kualitas pengungkapan yang disampaikan perusahaan.

Prinsip keterlibatan pemangku kepentingan menekankan bahwa perusahaan perlu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan serta kepentingan *stakeholder* yang relevan dalam proses penyusunan laporan keberlanjutan (Fadillah dan Harahap, 2023). Melalui prinsip ini, perusahaan diharapkan mampu menyusun laporan yang mencerminkan isu-isu keberlanjutan yang benar-benar penting bagi *stakeholder*. Dengan adanya laporan keberlanjutan diharapkan dapat mereprestasikan harapan dari *stakeholder* (Fadillah dan Harahap, 2023)

Prinsip materialitas mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan topik-topik yang memiliki implikasi mendalam mengenai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta memengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan *stakeholder* (Global Reporting Initiative, 2021). Menurut Fadillah dan Harahap (2023), materialitas menjelaskan bahwa keterlibatan isu keberlanjutan mencerminkan dampak yang signifikan. Penerapan prinsip materialitas bertujuan agar laporan keberlanjutan tidak bersifat umum, namun berfokus pada isu spesifik yang paling berkaitan dengan aktivitas dan risiko perusahaan.

Prinsip keberlanjutan menuntut perusahaan untuk menyajikan kinerja keberlanjutan dengan mempertimbangkan konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas (Global Reporting Initiative, 2021). Prinsip ini mendorong perusahaan untuk menjelaskan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh, bukan hanya pada tingkat internal perusahaan.

Prinsip kelengkapan menekankan bahwa laporan keberlanjutan harus mencakup cakupan topik dan periode waktu yang memadai agar *stakeholder* dapat menilai dampak dan kinerja perusahaan secara menyeluruh (Global Reporting

Initiative, 2021). Selain itu, dalam prinsip kelengkapan perlu adanya pengaturan pembatasan yang mencerminkan dampak yang signifikan sehingga memungkinkan untuk evaluasi pencapaian entitas dalam pelaporan keberlanjutan (Fadillah dan Harahap, 2023). Dengan demikian, laporan keberlanjutan diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai aktivitas dan dampak perusahaan.

GRI juga menetapkan prinsip kualitas laporan yang meliputi akurasi, keseimbangan, kejelasan, keterbandingan, keandalan, dan ketepatan waktu (Global Reporting Initiative, 2021). Agar informasi yang disajikan bernilai guna, dapat dipercaya, mudah dipahami, serta memiliki keterbandingan yang kuat antarperiode dan antarperusahaan, maka laporan keberlanjutan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip kualitas tersebut. Dengan digunakannya prinsip tersebut dapat meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan untuk dievaluasi oleh para pemangku kepentingan (Mulyani, 2022)

Penerapan prinsip-prinsip GRI di atas, laporan keberlanjutan diharapkan mampu menjadi alat akuntabilitas yang efektif dalam menyampaikan kinerja dan dampak perusahaan kepada para pemangku kepentingan secara transparan dan bertanggung jawab (Global Reporting Initiative, 2021).

2.1.2.4 *Global Reporting Initiative (GRI)*

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan prinsip pelaporan keberlanjutan yang digunakan secara internasional dan berfungsi membantu organisasi mengungkapkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya secara terbuka serta akuntabel (Global Reporting Initiative, 2021). GRI dikembangkan sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan pemangku

kepentingan terhadap informasi keberlanjutan yang dapat dibandingkan serta dapat dipercaya (Global Reporting Initiative, 2021).

Standar GRI yang saat ini diterapkan adalah GRI *Standards* 2021 yang bersifat modular dan terstruktur, sehingga memungkinkan organisasi menyusun laporan keberlanjutan sesuai dengan karakteristik, sektor, serta topik keberlanjutan yang relevan (Global Reporting Initiative, 2021). Struktur ini menggantikan pedoman GRI sebelumnya dan menegaskan peran GRI 2016 sebagai standar pelaporan keberlanjutan global (Global Reporting Initiative, 2021).

GRI *Standards* terdiri atas tiga kelompok utama, meliputi standar universal, standar sektor, dan standar topik (Global Reporting Initiative, 2021). Standar universal merupakan standar dasar yang wajib digunakan oleh seluruh organisasi dan mencakup pengungkapan umum terkait profil organisasi, tata kelola, strategi, serta proses penentuan topik material (Global Reporting Initiative, 2021). Standar ini menjadi fondasi utama dalam penyusunan laporan keberlanjutan.

Standar sektor digunakan guna menentukan topik keberlanjutan yang paling relevan berdasarkan sektor industri tempat organisasi beroperasi (Global Reporting Initiative, 2021). Penerapan standar sektor mendukung entitas menyusun laporan keberlanjutan yang lebih kontekstual dan berfokus pada dampak utama sektor, termasuk sektor energi yang memiliki risiko dan dampak lingkungan tinggi (Global Reporting Initiative, 2021).

Standar topik digunakan untuk mengungkapkan informasi secara lebih rinci mengenai topik keberlanjutan tertentu yang telah ditetapkan sebagai topik material, baik pada aspek ekonomi, lingkungan, maupun sosial (Global Reporting Initiative,

2021). Melalui standar topik, perusahaan dapat menjelaskan kebijakan, praktik, dan kinerja dalam mengelola dampak keberlanjutan yang relevan bagi pemangku kepentingan (Global Reporting Initiative, 2021). Dengan struktur standar universal, sektor, dan topik tersebut, GRI *Standards* yang saat ini diterapkan memberikan kerangka pelaporan keberlanjutan yang sistematis, fleksibel, dan dapat diperbandingkan.

2.1.3 Profitabilitas

Menurut Febriyanti (2021), profitabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk menciptakan laba melalui pengelolaan asetnya, yang mana indikator ini merepresentasikan kesehatan keuangan perusahaan secara makro. Dalam hubungannya dengan teori *stakeholder*, profitabilitas yang tinggi menandakan entitas memiliki daya dukung finansial untuk merealisasikan kepentingan ekonomi *stakeholder*, serta memiliki kelonggaran anggaran untuk mendanai aktivitas keterbukaan informasi (Febriyanti, 2021)

Pengukuran variabel profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi *Return on Assets* (ROA). Rasio tersebut dikalkulasikan dengan membagi laba bersih setelah pajak terhadap total aktiva, yang berfungsi sebagai indikator tingkat efisiensi entitas dalam mendayagunakan seluruh asetnya untuk mencetak keuntungan (Ebenhaezer dan Rahayu, 2022). Dalam penelitian ini, rumus profitabilitas menggunakan *Return on Assets* (ROA) sama halnya dengan penelitian Ebenhaezer dan Rahayu (2022), dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.4 *Leverage*

Leverage yaitu tingkat penggunaan utang perusahaan terhadap membiayai aktivitas operasional dan investasinya, yang mencerminkan struktur pendanaan (Hermawan dan Sutarti, 2021). *Leverage* merepresentasikan tingkat ketergantungan suatu entitas terhadap sumber pendanaan dari pihak luar, yang secara langsung berimplikasi pada besaran risiko finansial yang harus ditanggung oleh perusahaan (Yohana dan Suhendah, 2023)

Leverage berkaitan dengan kepentingan kreditur sebagai salah satu pemangku kepentingan utama perusahaan (Febriyanti, 2021). Perusahaan yang bergantung pada porsi pendanaan eksternal yang tinggi cenderung berada dalam tekanan untuk menjaga kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap perjanjian utang, sehingga dapat memengaruhi kebijakan pengungkapan informasi, termasuk pengungkapan laporan keberlanjutan (Ebenhaezer dan Rahayu, 2022)

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.1.5 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem dan mekanisme guna menyusun serta mengendalikan interaksi antara pemegang saham, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan entitas dikelola dengan transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab (Madona dan Khafid, 2020). Pelaksanaan GCG bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan *stakeholder* (Krisyadi dan Elleen, 2020).

GCG yang efektif diharapkan cakap untuk menstimulasi transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui penyediaan informasi yang relevan dan memadai bagi *stakeholder* (Sriningsih dan Wahyuningrum, 2022). GCG diprosikan melalui dewan komisaris independen, dan komite audit, keduanya mempunyai peran penting dalam fungsi pengawasan serta pengendalian manajemen dalam mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan entitas.

2.1.5.1 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan pengawas yang tidak mempunyai keterikatan finansial, kepengurusan, struktur kepemilikan modal, ataupun kekerabatan dengan jajaran eksekutif dan pemegang saham mayoritas. Independensi tersebut sangat krusial agar fungsi pengawasan korporasi dapat terlaksana tanpa intervensi (Madona dan Khafid, 2020). Keberadaan dewan komisaris independen bertujuan untuk memperkuat mekanisme pengawasan serta mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan perusahaan (Krisyadi dan Elleen, 2020).

Menurut Krisyadi dan Elleen (2020), variabel dewan komisaris independen dioperasionalkan dengan menghitung persentase atau porsi keterwakilan dalam struktur pengawasan. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi antara jumlah personel dewan komisaris independen dengan total seluruh anggota dewan komisaris, yang dijabarkan oleh Krisyadi dan Elleen (2020) sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

2.1.5.2 Komite Audit

Komite audit didefinisikan komite yang didirikan oleh dewan komisaris yang mengemban tugas membantu supervisi cara pelaporan keuangan, keandalan pengendalian internal, dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (Madona dan Khafid, 2020). Menurut Chulim *et al.* (2025), eksistensi komite audit krusial guna mengoptimalkan fungsi kontrol dan memvalidasi bahwa seluruh pelaporan, termasuk aspek non-keuangan, telah diungkapkan secara jujur serta dapat dipercaya. Adapun dari penelitian ini, komite audit dijabarkan berdasarkan jumlah anggota komite audit seperti pada penelitian Ulfa *et al.* (2025) :

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Pengujian	Hasil
1	<i>The Influence of the Audit Committee Characteristics and Institutional Ownership on Sustainability Report Disclosure</i> (Chulim <i>et al.</i> 2025)	Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> . Independen: independensi komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, kepemilikan institusional.	Regresi panel (FE/RE), uji t dan F.	Independensi, keahlian keuangan, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif, ukuran dan frekuensi rapat tidak berpengaruh.
2	Pengaruh Profitabilitas, Dewan Komisaris	Dependen: Pengungkapan	WarpPLS 8.0.	Profitabilitas, dewan komisaris

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Pengujian	Hasil
	Independen, <i>Foreign Ownership</i> , dan <i>Green Accounting</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Reporting</i> (Halfi Nurhakiki <i>et al.</i> 2025)	<i>sustainability reporting</i> . Independen: Profitabilitas, dewan komisaris independen, <i>foreign ownership</i> , <i>green accounting</i> .		independen, dan <i>green accounting</i> berpengaruh positif, <i>foreign ownership</i> tidak berpengaruh.
3	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Ulfa <i>et al.</i> 2025)	Dependen: Tingkat pengungkapan <i>sustainability report</i> . Independen: Komite audit, dewan komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan.	Analisis data panel	Komite audit tidak berpengaruh, dewan komisaris independen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif.
4	<i>Model Determining the Success of Sustainability Report Disclosure in Indonesia</i> (Triyono <i>et al.</i> 2025)	Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> . Independen: Profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas, ukuran perusahaan, <i>corporate governance</i> , <i>environmental performance</i> , <i>media exposure</i> .	Regresi linear berganda	Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan rapat dewan direksi berpengaruh positif signifikan, <i>leverage</i> dan komite audit tidak berpengaruh; likuiditas berpengaruh negatif.
5	Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> :	Dependen: Pengungkapan	Regresi linier berganda	Profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Pengujian	Hasil
	Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , Aktivitas Perusahaan dan Dewan Direksi (Irawan dan Kusumawati, 2025)	<i>sustainability report</i> . Independen: Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , aktivitas perusahaan, dewan direksi.		perusahaan tidak berpengaruh, <i>leverage</i> dan jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan.
6	Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> : Peran Kinerja Keuangan, <i>Good Corporate Governance</i> , dan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Dewi <i>et al.</i> 2025)	Dependen: Pengungkapan laporan keberlanjutan. Independen: Profitabilitas (ROA), <i>leverage</i> (DER), dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit. moderasi: ukuran perusahaan.	Regresi linier berganda	Semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan, ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan tersebut.
7	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan dengan Moderasi Audit Internal (Grediani dan Kapti, 2023)	Dependen: Pengungkapan laporan keberlanjutan. Independen: Proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit. Moderasi: Audit internal.	Regresi linier berganda	Komisaris independen, ukuran dewan, dan komite audit berpengaruh positif, audit internal tidak memperkuat hubungan tersebut.

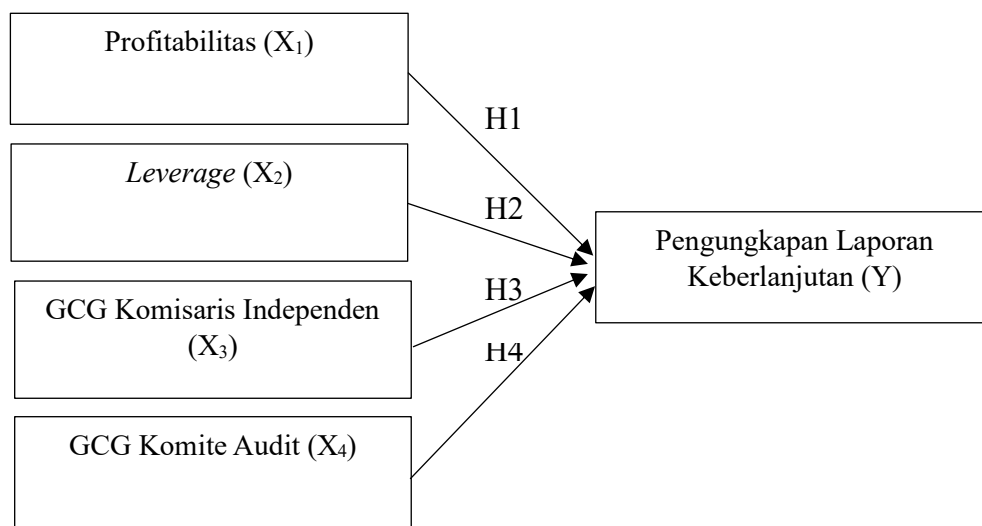
No	Judul Penelitian dan Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Pengujian	Hasil
8	<i>Sustainability Disclosure from Capital Structure and Firm Size: Does Independent Commissioner Matter?</i> (Putri dan Firmansyah, 2023)	Dependen: <i>Sustainability disclosure.</i> Independen: <i>Leverage, firm size.</i> Moderasi: Komisaris independen.	Regresi linier berganda	<i>Firm size</i> berpengaruh positif, <i>leverage</i> tidak berpengaruh, komisaris independen tidak memoderasi hubungan tersebut.
9	Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan pada Perusahaan Sektor Keuangan (Ebenhaezer dan Rahayu, 2022)	Dependen: Pengungkapan laporan keberlanjutan. Independen: profitabilitas (ROA), likuiditas (CR), solvabilitas (DAR).	Regresi linear berganda	Profitabilitas dan likuiditas berpengaruh negatif, solvabilitas berpengaruh positif.
10	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> serta Dampaknya terhadap <i>Return Saham</i> (Kusumawardani, 2022)	Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report.</i> Independen: <i>Institutional ownership, board of commissioners, audit committee, firm size.</i> Moderasi: <i>Return saham.</i>	Regresi data panel	<i>Firm size</i> berpengaruh positif, <i>good corporate governance</i> dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh, <i>Sustainability Report</i> tidak memengaruhi <i>return saham.</i>
11	Pengaruh <i>Comprehensive Stakeholder Pressure</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kualitas	Dependen: Kualitas <i>sustainability report.</i> Independen: <i>Stakeholder pressure</i> (investor,	Regresi linier berganda	Industri dekat konsumen, sensitif terhadap lingkungan, dan <i>media exposure</i> berpengaruh

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Pengujian	Hasil
	<i>Sustainability Report</i> (Sriningsih dan Wahyuningrum, 2022)	karyawan, konsumen, lingkungan, media, dll), <i>Good corporate governance</i>		positif, audit KAP Big 4 dan dewan komisaris berpengaruh negatif.
12	<i>The Influence of Majority Ownership, Profitability, Size of the Board of Directors, and Frequency of Board of Commissioners Meetings on Sustainability Report Disclosure</i> (Trisnawati et al. 2022)	Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> Independen: Kepemilikan mayoritas, profitabilitas, ukuran dewan direksi, frekuensi rapat dewan komisaris.	Regresi linier berganda.	Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan, kepemilikan mayoritas, profitabilitas, dan frekuensi rapat dewan tidak berpengaruh.
13	Pengaruh Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Hermawan dan Sutarti, 2021)	Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> . Independen: likuiditas (CR), <i>leverage</i> (DAR), profitabilitas (ROA).	Regresi linier berganda	Likuiditas dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh; profitabilitas berpengaruh negatif signifikan; secara simultan berpengaruh.
14	<i>Factors Affecting Sustainability Reporting Disclosure</i> (Febriyanti, 2021)	Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> . Independen: Umur perusahaan, wanita di dewan komisaris, wanita di dewan direksi, profitabilitas,	Regresi linier berganda	Keberadaan wanita di dewan direksi dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan, umur perusahaan, keberadaan wanita di dewan direksi

No	Judul Penelitian dan Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Pengujian	Hasil
		<i>leverage</i> .		dan profitabilitas tidak berpengaruh.
15	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi (Madona dan Khafid, 2020)	Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> . Independen: Komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial. Moderasi: Ukuran perusahaan.	Regresi moderasi (MRA).	Komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif, ukuran perusahaan memperkuat hubungan.
16	Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Krisyadi dan Elleen, 2020)	Dependen: Pengungkapan <i>sustainability report</i> . Independen: Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , profitabilitas, likuiditas, frekuensi rapat direksi, frekuensi rapat komite audit.	Regresi linear berganda (SPSS 22).	Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan rapat dewan direksi berpengaruh positif, <i>leverage</i> dan komite audit tidak berpengaruh; likuiditas berpengaruh negatif.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi merepresentasikan perusahaan yang mampu mempertahankan kinerja keuangan dan stabilitas operasional. Berdasarkan sudut pandang teori *stakeholder*, tanggung jawab korporasi telah bergeser dari yang semula hanya berorientasi pada pemegang saham (*shareholder*) ke yang kini meluas ke kreditur, regulator, masyarakat sipil, hingga dimensi lingkungan hidup. Akan tetapi, dalam konteks strategis perusahaan yang memaksimalkan profitabilitas, alih-alih mengalokasikan sumber daya mereka untuk memperluas pengungkapan laporan keberlanjutan, perusahaan cenderung lebih berfokus pada pencapaian profit dan efisiensi operasional daripada memperluas pengungkapan laporan keberlanjutan.

Penelitian Dewi *et al.* (2025) memaparkan perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung lebih terdorong untuk memperluas pengungkapan keberlanjutan guna memperoleh dukungan dan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas tinggi merasa telah mengantongi kepercayaan *stakeholder* perusahaan telah tercermin melalui pencapaian laba sehingga pengungkapan keberlanjutan tidak lagi menjadi prioritas utama (Dewi *et al.* 2025). Perusahaan lebih memilih mengalokasikan sumber daya untuk ekspansi bisnis dan penguatan operasional dibandingkan pengungkapan informasi nonkeuangan yang membutuhkan biaya tambahan (Ulfa *et al.* 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingginya profitabilitas justru dapat menurunkan dorongan perusahaan dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan secara luas.

Menurut Ulfa *et al.* (2025), profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Selaras dengan temuan Dewi *et al.* (2025), profitabilitas membawa dampak negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini dilandaskan terhadap argumen bahwa ketika tingkat perolehan laba yang tinggi, perusahaan cenderung mengalihkan fokus strategis mereka pada optimalisasi efisiensi dan maksimisasi keuntungan, sehingga mengesampingkan pelaporan aktivitas keberlanjutan (Dewi *et al.* 2025). Hal serupa ditemukan pada Hermawan dan Sutarti (2021) yang menjabarkan bahwa dengan tingginya profitabilitas belum tentu dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan. Hal ini disebabkan oleh pembuatan laporan keberlanjutan yang menyebabkan biaya yang dikeluarkan berakibat pada pengurangan laba yang dapat berakibat pada penurunan kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan

dalam menghasilkan laba. Dengan demikian, profitabilitas diproyeksikan mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan karena entitas dengan laba bebas lebih berfokus pada efisiensi dan pencapaian keuntungan dibandingkan dengan pengungkapan aktivitas keberlanjutan. Berdasarkan penjelasan teori serta temuan pada studi pendahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Teori *stakeholder* memandang kreditur diposisikan sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, yang mempunyai urgensi terhadap keberlanjutan dan stabilitas perusahaan (Febriyanti, 2021). Semakin tinggi *leverage* mendeskripsikan besarnya penggunaan dana eksternal, sehingga meningkatkan tuntutan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola risiko keuangan dan operasional (Hermawan dan Sutarti, 2021). Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana eksternal dan pengelolaan risiko, kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk bertindak lebih terbuka, salah satunya dengan memperluas cakupan informasi pada laporan keberlanjutannya (Putri dan Firmansyah, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Suroso (2025) menemukan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang besar dapat meningkatkan keterbukaan informasi nonkeuangan untuk mereduksi kekhawatiran *stakeholder* terhadap risiko perusahaan. Temuan sejalan ditunjukkan dalam penelitian Putri dan Firmansyah (2023) yang menyatakan bahwa struktur pendanaan berbasis utang mendorong

perusahaan untuk memperluas pengungkapan keberlanjutan sebagai bentuk transparansi kepada kreditur.

Secara logis, perusahaan dengan *leverage* yang besar berada dalam pengawasan yang lebih tegas dari pihak kreditur dan investor. Demi menjaga kepercayaan *stakeholder* tersebut, perusahaan terdorong untuk memperkuat kualitas dan luas pengungkapan laporan keberlanjutan guna menunjukkan komitmen dalam mengendalikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan sektor energi dan bahan baku (subsektor logam dan mineral) memiliki kebutuhan pendanaan besar dan dampak lingkungan signifikan. Pengungkapan laporan keberlanjutan menjadi sarana penting untuk meyakinkan *stakeholder* bahwa perusahaan mampu menjaga keberlanjutan usaha meskipun memegang tingkat *leverage* yang tinggi. Oleh karena itu, *leverage* diproyeksikan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Berdasarkan penjelasan teori serta temuan pada studi pendahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H2 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

2.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Teori *stakeholder* meninjau dewan komisaris independen sebagai tata kelola yang merepresentasikan kepentingan pemangku kepentingan eksternal nonmanajemen, sehingga mendorong perusahaan untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel (Madona dan Khafid, 2020). Eksistensi dewan komisaris independen

diyakini mampu mengurangi dominasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan serta memastikan bahwa kepentingan *stakeholder*, termasuk kepentingan sosial dan lingkungan, diperhatikan dalam kebijakan perusahaan (Krisyadi dan Elleen, 2020). Melalui fungsi pengawasan yang objektif, dewan komisaris independen dipandang dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan (Pratitarari dan Honggowati, 2025).

Studi yang dilakukan Pratitarari dan Honggowati (2025) mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi dewan komisaris independen berbanding lurus dengan perluasan pengungkapan laporan keberlanjutan. Temuan sejalan juga ditunjukkan dalam penelitian Nurhakiki *et al.* (2025) keberadaan dewan komisaris independen yang menyatakan bahwa eksistensi dewan pengawas independen ini berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu serta cakupan pelaporan keberlanjutan. Hasil-hasil penelitian tersebut merepresentasikan bahwa dewan komisaris independen memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan keterbukaan perusahaan dalam mengungkap isu keberlanjutan.

Secara logis, dewan komisaris independen yang tidak mempunyai afiliasi dengan pihak manajemen cenderung lebih objektif dalam menjalankan pengawasan dan menuntut keterbukaan informasi dari perusahaan. Perusahaan sektor energi serta sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral), memberikan dampak sosial dan lingkungan yang besar. Keberadaan dewan komisaris independen menjadi penting untuk memastikan bahwa dampak tersebut dikelola dan diungkapkan secara memadai kepada *stakeholder*. Dengan meningkatnya proporsi dewan komisaris

independen, perusahaan didorong untuk meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan guna menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan konsekuensi dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berdasarkan penjelasan teori serta temuan pada studi pendahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H3 : Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

2.4.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Merujuk terhadap pandangan teori *stakeholder*, komite audit bertugas selaku perpanjangan tangan dewan komisaris dalam pengawasan berkaitan dengan pertanggungjawaban dan keterbukaan terhadap pihak terkait (Madona dan Khafid, 2020). Kehadiran komite audit untuk mengevaluasi kualitas pelaporan perusahaan, salah satunya informasi nonkeuangan, sehingga eksistensinya diharapkan dapat mendesak perusahaan guna mempublikasi informasi keberlanjutan secara proporsional (Chulim *et al.* 2025). Melalui fungsi pengawasan tersebut, komite audit berperan dalam melindungi kepentingan *stakeholder* dengan menjamin perusahaan menyampaikan informasi yang substantif serta terpercaya (Madona dan Khafid, 2020).

Studi yang dilakukan Kholmi dan Susadi (2021) menemukan karakteristik komite audit yang kuat berkaitan dengan peningkatan keterbukaan informasi keberlanjutan perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut, studi yang dilakukan Madona dan Khafid (2020) mengutarakan bahwa keberadaan komite audit

berfungsi untuk memperkuat transparansi dan mutu pengungkapan laporan keberlanjutan. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa komite audit memegang fungsi esensial untuk meningkatkan transparansi informasi keberlanjutan

Secara logis, komite audit yang efektif mampu memastikan bahwa manajemen berorientasi pada kinerja finansial, namun terhadap pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang relevan bagi *stakeholder*. Perusahaan sektor energi dan sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) mempunyai profil risiko terhadap lingkungan dan sosial yang tinggi. Peran komite audit menjadi sangat penting untuk menegaskan bahwa dampak tersebut dikelola dan diungkapkan secara transparan. Dengan meningkatnya kapasitas pengawasan komite audit, perusahaan didorong untuk mendorong pengungkapan laporan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas kepada para *stakeholders*. Berdasarkan penjelasan teori serta temuan pada studi pendahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H4 : Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.